

**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
MANDIRI PEDESAAN DI DESA KOTA BANGUN
ILIR KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

Ayu Fitriana

**eJournal Ilmu Pemerintahan
Volume 1, Nomor 2, 2013**

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PEDESAAN DI DESA KOTA BANGUN ILIR KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ayu Fitriana ¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Narasumber terdiri dari para pelaku PNPM mandiri pedesaan di tingkat desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yaitu rangkaian proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PNPM mandiri pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir terdiri dari lima tahapan yaitu tahap penggalian gagasan tingkat dusun, tahap pembuatan proposal, tahap pembuatan dokumen perencanaan, tahap pembentukan tim pemelihara dan tahap pembuatan laporan pertanggungjawaban. Faktor pendukung kegiatan PNPM mandiri pedesaan selama ini diantaranya partisipasi masyarakat, lokasi tempat realisasi kegiatan, proses sosialisasi dan peningkatan kapasitas dari para pelaku PNPM mandiri pedesaan. Sementara faktor penghambat kegiatan PNPM mandiri pedesaan selama ini diantaranya pengadaan bahan/material untuk program pembangunan melalui proses lelang, belum optimalnya masyarakat mengembangkan potensi wilayah, serta penentuan usulan prioritas desa.

Kata Kunci: *implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat.*

Pendahuluan

Diantara permasalahan utama pembangunan Indonesia adalah masalah kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: fitriana_ayu@rocketmail.com

Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwasanya “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dengan kata lain, Negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, yakni diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin melalui upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, pemerintah melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No:25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri), menjadi tanda awal peluncuran PNPM Mandiri mulai tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015.

Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Dari observasi yang peneliti lakukan pada UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM Mandiri Kecamatan Kota Bangun, peneliti menemukan masalah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan yang telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini. Masalahnya antara lain, kegiatan para pelaku PNPM Mandiri Pedesaan yang belum efektif yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti partisipasi masyarakat yang masih kurang meskipun Sumberdaya Manusia (SDM) sudah memadai, atau justru sebaliknya partisipasi masyarakat yang sudah baik namun terkendala Sumberdaya Manusia (SDM) yang masih kurang. Selain itu juga pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan prosedur program dari PNPM Mandiri Pedesaan itu sendiri yang masih belum optimal.

Kemudian untuk keadaan di lapangan, beberapa permasalahan masyarakat miskin di Desa Kota Bangun Ilir yang peneliti temukan dalam dokumen Proposal Usulan Kegiatan Desa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Nomor: 113/06/16.2006/VI/2012 yang disahkan oleh Kepala Desa Kota Bangun Ilir bersama Ketua TPK Desa Kota Bangun Ilir diantaranya:

1. Sebelum masa penanaman dan sampai masa panen, masyarakat miskin sangat sulit melakukan kegiatan yang disebabkan sulitnya jalan menuju sawah. Sehingga terjadi keterlambatan penanaman yang

- berakibat kurangnya kualitas masa panen dan disaat panen petani sangat kesulitan untuk membawa hasil panen.
2. Lahan yang cukup luas namun belum dapat diolah secara maksimal oleh masyarakat.
 3. Kurangnya modal untuk mengembangkan usaha.
 4. Masih minimnya sumberdaya manusia yang ada di desa.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan

Wahab (2008:64) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau Dekrit Presiden). Sementara menurut Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri (2004:18-19), untuk mengimplementasikan kebijakan dapat digunakan suatu pendekatan dari bawah ke atas atau *bottom up* yaitu pendekatan yang melihat dari sudut pandang seseorang yang timbul karena proses perencanaan dari bawah ke atas yang dimulai dari mengenali kebutuhan ditingkat masyarakat secara langsung yang terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak-dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merille Grindle (dalam Agustino, 2006:139) yaitu pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu *action* program dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan publik itu sesungguhnya tidak hanya mengarah pada suatu tindakan-tindakan atau perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*negative effects*).

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Widjaja (2005:169) pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung

berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:

1. Akses terhadap sumberdaya
2. Akses terhadap teknologi
3. Akses terhadap pasar
4. Akses terhadap sumber pembiayaan

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah kondisi kehilangan (*deprivation*) terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Mereka yang berada dalam kategori miskin, hidupnya serba kekurangan (Sunyoto Usman, 2006).

Selanjutnya, menurut Sunyoto Usman (2006) paling tidak ada tiga macam konsep kemiskinan yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan subyektif. Konsep kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret (*a fixed yardstick*). Konsep kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan *the idea of relative standard*, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Sedangkan konsep kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri, konsep ini tidak mengenal *a fixed yardstick*, dan tidak memperhitungkan *the idea of relative standard*.

Berdasarkan klasifikasi kesejahteraan sosial masyarakat dalam dokumen Proposal Usulan Kegiatan Desa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Nomor: 113/06/16.2006/VI/2012 yang disahkan oleh Kepala Desa Kota Bangun Ilir bersama Ketua TPK Desa Kota Bangun Ilir, analisa mengenai permasalahan kemiskinan diantaranya:

1. Indikator/ciri-ciri masyarakat tidak miskin ialah:
 - a. Penghasilan di atas 1 juta/bulan
 - b. Makan 3 kali sehari
 - c. Memiliki rumah
 - d. Memiliki kendaraan lengkap
 - e. Memiliki pekerjaan tetap
2. Indikator/ciri-ciri masyarakat miskin ialah:

- a. Penghasilan kurang dari 1 juta/bulan dan di atas 500ribu/bulan
 - b. Makan kurang dari 3 kali sehari
 - c. Memiliki rumah/menyewa rumah
 - d. Atap rumah terbuat dari daun rumbia
 - e. Dinding rumah mudah jabuk (lapuk)
 - f. Tidak mempunyai kendaraan
 - g. Tidak memiliki pekerjaan tetap
3. Indikator/ciri-ciri masyarakat sangat miskin ialah:
- a. Penghasilan tidak menentu
 - b. Pekerjaan tidak tetap
 - c. Tidak memiliki rumah
 - d. Makan hanya 1 kali dalam sehari

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menko Kesra selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No:25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Berdasarkan dokumen Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan (Tim Koordinasi PNPM Mandiri Pedesaan) yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan diantaranya:

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana-sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
2. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat.

3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya lokal.
4. Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP).

Lebih lanjut, dalam dokumen Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan (Tim Koordinasi PNPM Mandiri Pedesaan) yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, ada beberapa pelaku PNPM Mandiri Pedesaan di tingkat desa yakni diantaranya :

1. Kepala Desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
4. Tim Penulis Usulan (TPU)
5. Tim Pemantau
6. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

Berdasarkan Pedoman Umum PNPM Mandiri yang dikeluarkan melalui Keputusan Menko Kesra NO: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007, pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri terdiri dari persiapan dan sosialisasi, perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, monitoring, pengelolaan pengaduan masyarakat, evaluasi, pelaporan.

Metode Penelitian

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi, sehingga dengan pembatasan studi tersebut akan mempermudah penelitian dalam pengambilan dan pengolahan data yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan bertitik tolak pada referensi di atas, maka fokus penelitian yang peneliti tetapkan meliputi 3 bidang program yang berjalan yakni:

1. Implementasi PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir yang meliputi 3 kegiatan yakni:
 - a. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
 - b. Pembangunan jalan jembatan usaha tani
 - c. Pembuatan saluran irigasi
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir.

Hasil Penelitian & Pembahasan

Implementasi PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir

Tahapan dalam implementasi PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir terdiri dari lima tahapan yakni sebagai berikut:

A. Tahap Penggalan Gagasan di Tingkat Dusun

Tahap penggalan gagasan di tingkat dusun adalah tahapan pertama yang dilakukan dalam proses implementasi PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir. Dalam tahapan ini diselenggarakan musyawarah penggalan gagasan masyarakat di tingkat dusun dengan tujuan untuk menyaring aspirasi masyarakat terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) sekaligus melakukan sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada perangkat pemerintahan, baik pihak eksekutif maupun legislatif, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat pengusaha, media massa serta masyarakat umum lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan untuk tahun 2011-2012 di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, telah dilaksanakan pertemuan/musyawarah penggalan gagasan di Desa Kota Bangun Ilir oleh para pelaku PNPM Mandiri Pedesaan dan aparat pemerintahan desa serta LPM bersama masyarakat, di tingkat dusun yakni Dusun I, Dusun II dan Dusun III yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat desa serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan. Selengkapnya, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Pelaksanaan Pertemuan/Musyawarah Penggalan Gagasan di Tingkat Dusun

No.	Berita Acara	Materi atau Topik
1.	Pertemuan Dusun I KBI Hari/Tanggal : Senin/7 Mei 2012 Jam : 19.30 s/d 22.30 Wita Tempat : Rumah Kepala Dusun I	a. Memperkenalkan PNPM Mandiri Pedesaan kepada kelompok laki-laki, perempuan atau campuran. b. Melakukan pendataan dan memperbaharui data RTM.
2.	Pertemuan Dusun II KBI Hari/Tanggal : Kamis/10 Mei 2012 Jam : 19.30 s/d 22.00 Wita Tempat : Rumah Kepala Dusun II	c. Melakukan penyusunan peta sosial. d. Menggali gagasan kegiatan untuk diusulkan dalam musyawarah khusus perempuan dan musyawarah desa perencanaan.
3.	Pertemuan Dusun III KBI Hari/Tanggal : Senin/14 Mei 2012 Jam : 19.30 s/d 22.30 Wita Tempat : Rumah Kepala Dusun III	e. Menentukan utusan kelompok/dusun ke musyawarah khusus perempuan dan musyawarah desa perencanaan.

Sumber: PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir 2012

Beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari pertemuan/musyawarah, untuk masing-masing keputusan akhir dari pertemuan/musyawarah di Dusun I, II dan III Desa Kota Bangun Ilir dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

1. Hasil akhir penetapan penggalan gagasan pada pertemuan/musyawarah Dusun I Desa Kota Bangun Ilir diantaranya:
 - a. Pelatihan pembudidayaan jamur tiram
 - b. Pelatihan pembudidayaan dan pembuatan pakan ikan patin dan pakan ikan lele sangkuriang.
2. Hasil akhir penetapan penggalan gagasan pada pertemuan/musyawarah Dusun II Desa Kota Bangun Ilir diantaranya:
 - a. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

- b. Pelatihan perbengkelan
- c. Pembuatan saluran irigasi
3. Hasil akhir penetapan penggalian gagasan pada pertemuan/musyawarah Dusun III Desa Kota Bangun Ilir diantaranya:
 - a. Pembangunan jalan/jembatan usaha tani
 - b. Pembuatan saluran irigasi/pengairan sawah
 - c. Pelatihan pembudidayaan jamur tiram
 - d. Pelatihan perbengkelan las dan bubut

B. Tahap Pembuatan Proposal Pengajuan Program

Tahap pembuatan proposal pengajuan program adalah tahap kedua yang dilakukan dalam proses implementasi PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir oleh para pelaku PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir sendiri. Dalam tahapan ini bertujuan untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terutama RTM untuk terlibat secara aktif dalam identifikasi kebutuhan dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan

Sebagai langkah lanjutan dari pertemuan/musyawarah penggalian gagasan ditingkat Dusun I, II dan III Desa Kota Bangun Ilir yang telah dijelaskan pada tahapan sebelumnya, maka selanjutnya usulan-usulan yang telah ditetapkan tersebut akan disepakati lagi dalam Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP) dan Musyawarah Desa Perencanaan (MDP) yang diselenggarakan oleh para pelaku PNPM Mandiri Pedesaan dan aparat pemerintahan desa serta LPM, yang juga dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat desa, serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, untuk kemudian dijadikan sebagai usulan prioritas Desa Kota Bangun Ilir. Dalam tabel berikut ini akan dijelaskan mengenai berita acara kedua musyawarah tersebut:

Tabel 2
Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP) dan Musyawarah Desa Perencanaan (MDP)

No.	Berita Acara	Materi atau Topik
1.	MDKP Hari/Tanggal : Minggu, 20 Mei 2012 Jam : 09.30 s/d 12.30 Wita Tempat : Kantor LPM KBI	<ol style="list-style-type: none"> a. Menentukan usulan kegiatan yang merupakan aspirasi perempuan meliputi: kegiatan pembangunan prasarana, kegiatan peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif, kegiatan bidang kesehatan, kegiatan bidang pendidikan. b. Menentukan usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok simpan pinjam perempuan yang masih berjalan aktif dan berusia minimal 1 tahun. c. Memilih wakil perempuan untuk hadir dalam MAD Prioritas Usulan. d. Memilih wakil perempuan yang akan terlibat dalam penulisan usulan.
2.	MDP Hari/Tanggal : Minggu, 20 Mei 2012 Jam : 09.30 s/d 12.30 Wita Tempat : Kantor LPM KBI	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengesahkan usulan-usulan kegiatan hasil Musyawarah Khusus Perempuan dan menetapkan usulan-usulan kegiatan yang akan diajukan desa ke MAD Prioritas Usulan. b. Menetapkan enam wakil desa ke MAD

		Prioritas Usulan dan MAD Penetapan Usulan. c. Menetapkan TPU. d. Menetapkan calon pengamat proses MAD.
--	--	--

Sumber: PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir, 2012

Berdasarkan kedua hasil musyawarah yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2011-2012, ada 3 program dari PNPM Mandiri Pedesaan yang dijalankan untuk Desa Kota Bangun Ilir, yaitu pembangunan jalan jembatan usaha tani, pembangunan saluran irigasi dan kelompok SPP. Maka selanjutnya akan dibuat proposal usulan kegiatan yang telah disepakati dan disahkan menjadi ketetapan usulan desa.

Dalam proposal usulan kegiatan tersebut, dijelaskan mengenai identifikasi permasalahan dan apa tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah tabel penjelasan mengenai proposal usulan masing-masing kegiatan:

Tabel 3
 Proposal Usulan Program Jalan Jembatan Usaha Tani di Desa Kota Bangun Ilir

No.	Daftar	Uraian
1.	Latar belakang masalah	Sebelum masa penanaman dan sampai masa panen, masyarakat miskin kesulitan melakukan kegiatan yang disebabkan sulitnya jalan menuju sawah. Sehingga terjadi keterlambatan penanaman yang berakibat kurangnya kualitas masa panen dan disaat panen petani kesulitan untuk membawa hasil panen.
2.	Tujuan	Dengan adanya pembangunan jalan jembatan usaha tani ini, diharapkan akan memudahkan masyarakat miskin untuk melakukan pengolahan sawah, penanaman dan membawa hasil panen.
3.	Pendukung	Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan bantuan dari pihak yang terkait diantaranya PNPM-MP, desa dan swadaya masyarakat serta pihak lain untuk membantu dan membangun jalan jembatan usaha tani, dan dalam proses perencanaan semua masyarakat ikut dilibatkan, hingga tahap menentukan usulan dan pelaksanaan kegiatan.

Sumber: PNPM Mandiri di Desa Kota Bangun Ilir, 2012

Tabel 4
 Proposal Usulan Program Perbaikan Saluran Irigasi di Desa Kota Bangun Ilir

No.	Daftar	Uraian
1.	Latar belakang masalah	Saluran irigasi/drainase mampat, tidak ada aliran air langsung menuju sungai Mahakam, sehingga apabila musim hujan, lokasi ini akan tergenang banjir, yang mana membuat para petani kesulitan untuk bercocok tanam dan masyarakat kesulitan menyalurkan air ke Mahakam.
2.	Pemecahan Masalah	Perbaikan saluran irigasi sepanjang 750 meter yang menuju sungai, yang mana diharapkan membantu masyarakat agar dapat bercocok tanam dengan maksimal. Karena dengan berkurangnya atau hilangnya banjir di permukiman dan lahan pertanian warga, maka dengan sendirinya kelangsungan dan pemanfaatan saluran drainase/irigasi tersebut akan digunakan. Sehingga, masyarakat khususnya yang ada di Desa Kota Bangun Ilir dapat mengalirkan air yang mengenang disemua petak persawahan dan memberi motivasi kepada petani agar dapat meningkatkan produksi padi yang lebih baik dan bermutu tinggi.

Sumber : PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir, 2011

Tabel 5
 Proposal Usulan Program SPP di Desa Kota Bangun Ilir

No.	Daftar	Uraian
1.	Latar belakang masalah	Tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran para ibu rumah tangga, maka dianggap perlu adanya suatu kelompok simpan pinjam khusus bagi perempuan, hal ini mengingat posisi seorang ibu rumah tangga yang mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga, dimana terdapat anak-anak sebagai generasi penerus.
2.	Tujuan	Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera sesuai dengan program Bupati Kutai Kartanegara yakni Gerakan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja).
3.	Manfaat	Membantu masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang khususnya bagi para peminjam, dan ikut berperan serta dalam bidang simpan pinjam perempuan misalnya sumbang saran dalam penentuan/musyawahah ini dan dapat berperan aktif di dalam pembangunan untuk mencapai masyarakat Kutai Kartanegara yang mandiri dan sejahtera.

Sumber: PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir, 2011

C. Tahap Pembuatan Dokumen Perencanaan Program

Tahap pembuatan dokumen perencanaan program merupakan tahap ketiga yang dilakukan oleh para pelaku PNPM Mandiri Pedesaan dan aparat pemerintahan desa serta LPM bersama masyarakat, dalam proses implementasi PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir. Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan dari tahapan sebelumnya. Setelah tahap pembuatan proposal usulan kegiatan telah selesai, maka selanjutnya adalah pembuatan dokumen perencanaan program. Yang mana dalam dokumen tersebut dijelaskan mengenai bagaimana proses pelaksanaan masing-masing usulan kegiatan.

1) Pelaksanaan Pembangunan Jalan Jembatan Usaha Tani

Pada tahap ini, dibuatlah gambaran mengenai rancangan struktur jembatan yang akan dibangun yang dibuat oleh fasilitator teknik Kecamatan. Kemudian selanjutnya, dibuatlah rekapitulasi anggaran biaya untuk proses pelaksanaan pembangunan jalan jembatan usaha tani tersebut.

Untuk kegiatan jalan usaha tani (konstruksi kayu ulin) Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara maka dilaksanakanlah prosedur pelelangan. Kemudian, setelah diselenggarakan acara penentuan pemenang yang akan memasok bahan/material kayu ulin/meranti yang diperlukan bagi kegiatan pembangunan jalan usaha tani (konstruksi kayu ulin) di Desa Kota Bangun Ilir.

Selanjutnya, adalah dikeluarkannya Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 028/PNPM-MP/SPPB/Kec. Ktb/IX/2012 Tanggal 21 September 2012 dimana Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MP Kecamatan Kota Bangun bertindak atas nama forum menyetujui pembayaran dana bantuan PNPM Mandiri Pedesaan kepada Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kota Bangun Ilir sebesar Rp 254.724.100,- (Dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah). Bantuan tersebut bersifat bantuan lepas.

Ketua TPK akan menyerahkan dana kepada kelompok masyarakat sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa. Atas penyerahan dana tersebut harus dibuat berita acara serah terima/tanda terima. Ketua TPK juga wajib menyebarluaskan SPPB tersebut melalui papan pengumuman paling sedikit di tiga tempat umum di desa.

Dengan telah dilaksanakannya proses aliran dana tersebut, maka kegiatan pembangunan jalan jembatan usaha tani sudah bisa dilaksanakan. Untuk lokasi pembangunan jembatan yang dilaksanakan, telah dibuat surat pernyataan bersama yang disahkan oleh pihak-pihak terkait, mengenai pernyataan tulus ikhlas dari warga yang bersangkutan untuk menghibahkan sebidang tanah milik mereka dan selanjutnya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan jembatan usaha tani, sehingga dengan adanya surat pernyataan tersebut maka gugurlah hak warga yang bersangkutan untuk tanah tersebut, dan menjadi hak Pemerintah Desa Kota Bangun Ilir guna kepentingan masyarakat bersama.

2) Pelaksanaan Perbaikan Saluran Irigasi

Pada tahap ini, dibuatlah rekapitulasi rencana anggaran dan biaya untuk jenis kegiatan prasarana normalisasi saluran drainase oleh para pelaku PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir. Dalam rencana tersebut telah diperhitungkan berapa total estimasi biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan teknis dan operasional selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, mulai dari persiapan bahan dan peralatan, biaya upah pekerja dan operasional kegiatan.

Kemudian setelah proses tersebut telah selesai, maka dikeluarkanlah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 04/PNPM-MP/SPPB/Kec.Ktb/IX/2011 Tanggal : 22 September 2011. Dimana Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MP Kecamatan Kota Bangun bertindak atas nama forum menyetujui pembayaran dana bantuan PNPM Mandiri Pedesaan kepada Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kota Bangun Ilir sebesar Rp53. 221. 200,00 (Lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah). Bantuan ini bersifat bantuan lepas.

Ketua TPK akan menyerahkan dana kepada kelompok masyarakat sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa. Atas penyerahan dana tersebut harus dibuat berita acara serah terima/tanda terima. Ketua TPK juga wajib menyebarluaskan SPPB tersebut melalui papan pengumuman paling sedikit di tiga tempat umum di desa.

3) Pelaksanaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Dalam tahap ini, dibuatlah profil kelompok SPP oleh para pelaku PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir. Dalam profil tersebut dijelaskan mengenai jabatan kepengurusan yang ada di dalam kelompok.

Kemudian, selanjutnya dibuat surat permohonan kredit yang ditanda tangani oleh pengurus kelompok/ketua kelompok, dalam surat permohonan tersebut disebutkan bahwasanya seluruh anggota kelompok Karya Usaha Bersama mengajukan permohonan kredit sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal usaha 10 orang anggota. Untuk sejumlah kredit tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan sistem angsuran bulanan (pokok beserta bunganya), dan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan pula dalam surat permohonan tersebut yakni daftar anggota kelompok calon pemanfaat kredit, fotocopy KTP dari 10 orang anggota yang mengajukan kredit, pernyataan kesediaan tanggung renteng dari seluruh anggota, berita acara kesanggupan menabung anggota ke kelompok, rencana pengembalian kredit anggota, rencana pengembalian kredit kelompok ke UPK, dan terakhir rencana kegiatan kelompok. Berikut adalah daftar anggota kelompok simpan pinjam Karya Usaha Bersama Desa Kota Bangun Ilir:

Tabel 6
Daftar Anggota Kelompok SPP Karya Usaha Bersama

No.	Nama	Alamat	Umur	Pekerjaan
1.	Novia Handayani	Jl. Awang Long RT.09	33 tahun	Perdagangan
2.	Nurul Huda	Jl. Awang Long RT.11	33 tahun	Perdagangan
3.	Hartati	Jl. Awang Long RT.10	32 tahun	Guru
4.	Neni Triana	Jl. Awang Long RT.3	32 tahun	Perdagangan
5.	Dennis .S	Jl. Awang Long RT.11	23 tahun	Perdagangan
6.	Desy Astuti	Hasbullah Hasyari	35 tahun	Perdagangan
7.	Yunita	Hasbullah Hasyari	33 tahun	Penjahit
8.	Eni Kusrini	Jl. Awang Long RT.11	37 tahun	Keramba ikan
9.	Padmasari .D	Jl. Awang Long RT.12	30 tahun	Bidan
10.	Nurhayati	Hasbullah Hasyari	36 tahun	Pengolah kerupuk

Sumber: PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir, 2011

Dan setelah usulan tersebut disetujui, maka dikeluarkanlah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 04/PNPM-MP/SPPB/Kec.Ktb/IX/2011 Tanggal : 22 September 2011. Dimana Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MP Kecamatan Kota Bangun bertindak atas nama forum menyetujui pembayaran dana bantuan kepada Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kota Bangun Ilir sebesar Rp 31.579.000,- (Tiga puluh satu

juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ratus ribu rupiah). Sifat bantuan adalah bantuan pinjaman dan jasa pinjaman sebesar 15%.

Ketua TPK akan menyerahkan dana kepada kelompok masyarakat sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa. Atas penyerahan dana tersebut harus dibuat berita acara serah terima/tanda terima.

D. Tahap Pembentukan Tim Pemelihara

1) Program Jalan Jembatan Usaha Tani

Adapun proses pembentukan tim pengelola pemeliharaan pada kegiatan sarana dan prasarana jalan/jembatan usaha tani diawali pencalonan dari masyarakat di desa kemudian diadakan pemilihan dengan cara musyawarah mufakat. Selanjutnya dibuatlah mekanisme pelaksanaan pemeliharaan kegiatan. Pengawasan menganut sistem pengawasan melekat atau pengawasan mandiri dalam pengertian tanggung jawab pengawasan ada pada BPD, LPM dan seluruh masyarakat Desa Kota Bangun Ilir, kemudian secara periodik yaitu minimal 3 bulan sekali perlu dibuat laporan tertulis.

2) Program Perbaikan Saluran Irigasi

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana perbaikan saluran irigasi dibutuhkan dana atau biaya yang besarnya akan tergantung pada kondisi yang ada. Disepakati dan disetujui bersama bahwa kebutuhan dana guna menunjang kegiatan pemeliharaan akan diadakan sendiri oleh Desa atau masyarakat. Rencana kerja yang telah disepakati dan disetujui bersama yaitu:

- a. Pemantauan: meliputi pemantauan prasarana, kondisi prasarana dan tingkat kerusakan prasarana, dan lain-lain.
- b. Penanggungjawab dan pelaksana: tim pemelihara.
- c. Frekuensi pemantauan: 3 bulan. Kegiatan bersifat periodik: 6 bulan.
- d. Kegiatan darurat: sewaktu-waktu.

3) Program Kelompok SPP

Dalam rencana pemeliharaan terhadap keberlanjutan kelompok SPP, akan selalu dibahas dan dimusyawarahkan kembali di kemudian hari secara periodik. Dan evaluasi disepakati untuk diadakan tiga bulan sekali. Hal tersebut merupakan perwujudan dan kesanggupan dari TPK dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan hingga batas waktu akhir pengembalian (1 tahun).

E. Tahap Pembuatan Laporan Akhir

Tahap pembuatan laporan akhir merupakan tahapan yang terakhir dalam proses implementasi PNPM – MP di Desa Kota Bangun Ilir. Dalam tahap ini, pelaporan kegiatan PNPM MP dilaksanakan secara berkala dan berjenjang melalui jalur struktural (perangkat pemerintah) dan jalur fungsional (konsultan dan fasilitator).

Untuk program pembangunan jalan jembatan usaha tani, berdasarkan penelitian yang dilakukan dokumen yang ada adalah proposal mengenai usulan kegiatan, dokumen perencanaan jenis usulan kegiatan, dan surat perjanjian kontrak antara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kota Bangun Ilir dengan pihak yang mengadakan bahan/material pengerjaan bangunan. Untuk laporan

akhir pelaksanaan kegiatan, saat ini masih dalam tahap penyelesaian pembuatan dan belum dibukukan.

Untuk program normalisasi saluran drainase, berdasarkan penelitian yang dilakukan dokumen yang ada telah lengkap, diantaranya dokumen proposal usulan kegiatan, dokumen perencanaan jenis usulan kegiatan dan laporan akhir jenis kegiatan dan laporan pertanggungjawaban dana.

Kemudian untuk program kelompok simpan pinjam SPP Karya Usaha Bersama, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dokumen yang ada juga telah lengkap, diantaranya dokumen proposal usulan kegiatan, dokumen perencanaan jenis usulan kegiatan dan dokumen laporan akhir pelaksanaan jenis kegiatan SPP.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian.

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang telah dilaksanakan di Desa Kota Bangun Ilir terdiri dari tahapan musyawarah penggalan gagasan ditingkat dusun. Kedua, tahap pembuatan proposal pengajuan program. Ketiga, tahap pelaksanaan kegiatan. Keempat, pembentukan tim pemeliharaan kegiatan. Dan kelima, dibuatlah dokumen laporan akhir pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan.
2. Pelaksanaan PNPM MP pada program kegiatan sarana dan prasarana yakni pembangunan jalan jembatan usaha tani dan normalisasi saluran drainase, manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat, karena memudahkan jalan menuju ke sawah sehingga diharapkan dapat memberi motivasi kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tanamannya. Dan membantu kelancaran saluran pengairan persawahan, agar lokasi tidak lagi tergenang pada saat banjir.
3. Pelaksanaan PNPM MP pada program penambahan permodalan SPP, terdiri dari satu kelompok SPP Karya Usaha Bersama. Manfaat program ini sangat dirasakan terutama oleh para peminjam, karena mendapatkan pinjaman dengan jumlah bunga yang tidak terlalu besar, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan usaha.
4. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan kegiatan PNPM MP di Desa Kota Bangun Ilir selama ini diantaranya ialah masyarakat sendiri yang bertindak sebagai pelaku utama pembangunan dan turut berpartisipasi dalam setiap tahapan dalam implementasi PNPM MP. Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat realisasi kegiatan juga menjadi faktor yang sangat penting. Tahap proses sosialisasi juga menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang PNPM MP. Selanjutnya, peningkatan kapasitas dari para pelaku PNPM MP di Desa Kota Bangun Ilir juga sangat membantu bagi peningkatan kinerja bagi pelaksanaan PNPM MP.

5. Sementara untuk faktor penghambat dari pelaksanaan kegiatan PNPM MP di Desa Kota Bangun Ilir selama ini diantaranya ialah pengadaan bahan/material untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana, karena melalui beberapa tahapan yang salah satunya ialah melalui proses lelang dimana dikhawatirkan terjadinya *force majeure* atau suatu kejadian akibat bencana alam yang menghambat/merusakkan pekerjaan yang dilakukan. Keadaan kelompok SPP yang belum terlihat ada upaya signifikan untuk lebih mengembangkan dan memberdayakan kelompok kearah yang bersifat inisiatif dan inovatif. Kemudian penentuan usulan prioritas diantara banyaknya jumlah usulan dari masyarakat dapat, karena harus memperhatikan benar untuk program mana yang didahulukan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut ini :

1. Pelaksanaan kegiatan PNPM MP Desa Kota Bangun Ilir sebaiknya lebih menekankan pada program-program yang dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat terutama RTM, dan program tidak hanya berhenti sampai pada tahap pelaksanaan sampai akhir saja, tetapi bagaimana keberlanjutan setelah itu, agar program tidak sekedar hilang dan timbul, tetapi juga benar-benar bermanfaat dan dilanjutkan kearah yang lebih berkembang lagi.
2. Untuk memberikan motivasi dalam hal kinerja keanggotaan dan kepengurusan PNPM MP sebaiknya dibuat suatu penilaian atas kinerja masing-masing kader dan pelaku PNPM PM selama menjalankan peran mereka, hal ini dimaksudkan agar dengan diberikan penghargaan sebagai kader terbaik, pelaku PNPM MP terbaik, atau warga masyarakat dengan partisipasi terbaik dalam suatu periode tertentu, dapat memberikan motivasi dan semangat lebih bagi seluruh pihak untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja mereka.
3. Untuk keanggotaan dan kepengurusan kelompok simpan pinjam SPP, terutama bagi pihak peminjam agar kedepan tidak hanya terbatas pada kegiatan simpan dan meminjam uang saja, tetapi lebih dari itu, yakni dapat dipergunakan untuk memberdayakan kelompok dalam menggali potensi unggulan apa yang dimiliki desa mereka dan apa yang bisa dikembangkan.
4. Agar dalam proses pengadaan bahan/material dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan melalui proses lelang berjalan dengan lancar, maka diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa saling meningkatkan pengawasan dan saling membantu, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Untuk Desa Kota Bangun Ilir secara keseluruhan baik pihak aparat pemerintah desa maupun dari masyarakat agar dapat mempertahankan hal-hal baik yang sudah dilaksanakan selama kegiatan PNPM MP ini, dan terus meningkatkannya lagi kearah yang lebih baik dan lebih berkembang demi terwujudnya pembangunan desa yang maju.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah (Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan)*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Usman, Sunyoto. 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa (merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress (Anggota IKAPI).